



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/t1seat26

Hal. 453-459

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Analisis Studi Gender terhadap Ketidakadilan Gender di Jakarta: Perspektif Sosial, Budaya, dan Kebijakan Publik

Zefanya Octoberi¹, Nita Yuliana², Sarmauli³

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen,
Institut Agama Kristen Negeri, Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

*Email: zefanyaoktoberi@gmail.com¹ yuliananita563@gmail.com sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id

Diterima: 02-10-2025 | Disetujui: 12-10-2025 | Diterbitkan: 14-10-2025

ABSTRACT

Gender inequality in Jakarta remains a complex and systemic social problem, encompassing social, cultural, economic, and political spheres. Although development progress has increased women's access to education and employment, structural and cultural inequalities continue to hinder the achievement of gender equality. This study analyzes gender inequality in Jakarta through a gender perspective, highlighting the role of patriarchy, the ideology of State Ibuism, and the weakness of public policies responsive to women's needs. The analysis shows that discrimination against women is still evident through double workloads, marginalization in the informal sector, and minimal political representation. Furthermore, cultural factors reinforce stereotypes and traditional roles for women in urban society. Efforts to address gender inequality require systemic change through education, policy, and increased public awareness of the importance of equal roles. By implementing gender studies in policy and social life, Jakarta is expected to become an inclusive and equitable city for both men and women.

Keywords: Gender inequality; Gender studies; Patriarchy; Public policy; Gender equality

ABSTRAK

Ketidakadilan gender di Jakarta masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan sistemik, mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Meskipun kemajuan pembangunan telah meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, kesenjangan struktural dan kultural tetap menghambat tercapainya kesetaraan gender. Penelitian ini menganalisis ketidakadilan gender di Jakarta melalui perspektif studi gender yang menyoroti peran patriarki, ideologi *State Ibuism*, serta lemahnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terlihat melalui beban kerja ganda, marginalisasi di sektor informal, serta keterwakilan politik yang minim. Selain itu, faktor budaya turut memperkuat stereotip dan peran tradisional perempuan dalam masyarakat urban. Upaya mengatasi ketidakadilan gender menuntut perubahan sistemik melalui pendidikan, reformasi kebijakan, dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya kesetaraan peran. Dengan penerapan studi gender dalam kebijakan dan kehidupan sosial, Jakarta diharapkan mampu menjadi kota yang inklusif dan berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: Ketidakadilan gender; Studi gender; Patriarki; Kebijakan publik; Kesetaraan gender



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Zefanya Octoberi, Nita Yuliana, & Sarmauli. (2025). Analisis Studi Gender terhadap Ketidakadilan Gender di Jakarta: Perspektif Sosial, Budaya, dan Kebijakan Publik. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 453-459. <https://doi.org/10.63822/t1seat26>



PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender di Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai kota metropolitan, masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Meskipun kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik telah meningkatkan peran serta perempuan di ruang publik, realitas sosial menunjukkan bahwa kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan masih berlangsung secara sistemik. Ketimpangan tersebut tampak pada keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal, keterwakilan politik yang rendah, serta masih kuatnya stereotip budaya yang menempatkan perempuan pada ranah domestik. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi nilai sosial yang berpihak pada kesetaraan gender.

Secara teoritis, studi gender memandang bahwa ketidakadilan gender merupakan hasil konstruksi sosial yang membentuk perbedaan peran dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Oakley, 1972). Dalam konteks Indonesia, (Fakih, 2013) menegaskan bahwa ketidakadilan gender tampak dalam lima bentuk, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja ganda, dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu, penelitian kontemporer oleh (Aisyah, 2020) dalam *Asian Journal of Women's Studies* menunjukkan bahwa perempuan di wilayah perkotaan Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dalam akses terhadap pekerjaan formal yang layak. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun tingkat pendidikan perempuan meningkat, sistem kerja yang masih bias gender membuat mereka cenderung terjebak pada pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh laporan UN (Indonesia, 2021) yang menyoroti bahwa kesenjangan gender di kota besar, termasuk Jakarta, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh budaya dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan. Namun, penelitian ini masih berfokus pada isu ketenagakerjaan dan ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dengan mengaitkan ketidakadilan gender di Jakarta dari tiga perspektif utama, yaitu sosial, budaya, dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti dimensi ekonomi, tetapi juga melihat bagaimana ideologi patriarki dan nilai budaya turut memperkuat ketimpangan gender di wilayah perkotaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di Jakarta jika dilihat dari perspektif sosial, budaya, dan kebijakan publik, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi ketimpangan tersebut, serta bagaimana pendekatan studi gender dapat diterapkan untuk menganalisis dan menawarkan solusi terhadap ketidakadilan gender di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketidakadilan gender di Jakarta disebabkan oleh kombinasi faktor struktural dan kultural yang saling memperkuat, di mana kebijakan publik yang belum responsif gender turut memperpanjang diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang sosial dan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab ketidakadilan gender di Jakarta berdasarkan perspektif studi gender, mengkaji relevansi teori-teori gender dalam memahami konteks perkotaan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi gender di Indonesia serta menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena ketidakadilan gender di Jakarta berdasarkan perspektif sosial, budaya, dan kebijakan publik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif makna di balik praktik-praktik sosial yang melanggengkan ketimpangan gender serta menafsirkan data berdasarkan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Data penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan studi literatur terhadap berbagai laporan resmi lembaga pemerhati perempuan seperti LBH APIK Jakarta, *UNICEF Indonesia*, dan *UN Women Indonesia* yang secara berkala menerbitkan data mengenai kesenjangan dan kekerasan berbasis gender di wilayah perkotaan. Selain itu, wawancara tidak langsung dilakukan dengan menelaah testimoni dan dokumentasi publik dari situs lembaga tersebut yang menggambarkan pengalaman perempuan dalam menghadapi diskriminasi sosial dan ekonomi di Jakarta. Data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan riset nasional dan internasional yang relevan dengan isu ketidakadilan gender, di antaranya penelitian (Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 2013), (Ford, 2011), serta (Aisyah, *Women's Employment, Gender Norms, and Urban Inequality in Indonesia*, 2020) yang memberikan landasan teoretis dan kontekstual bagi analisis penelitian ini.

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada interpretasi makna dan pola-pola ketidakadilan gender dalam teks dan dokumen. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data dikategorikan ke dalam tiga aspek utama: sosial, budaya, dan kebijakan publik. Tahap penyajian dilakukan dengan menata data dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan hubungan antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data untuk menemukan akar penyebab ketidakadilan gender serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan gender di Jakarta.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan teoretis yang jelas mengenai ketidakadilan gender di Jakarta, sekaligus menawarkan pendekatan berbasis studi gender yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan transformasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender di Jakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakadilan gender di Jakarta muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Dalam sektor ketenagakerjaan, kesenjangan terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal. Data dari (Jakarta, 2022) memperlihatkan bahwa laki-laki masih mendominasi lapangan kerja formal, sementara sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, pekerja rumah tangga, dan usaha mikro. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Ford, *Out of the Shadows: Organising Women Workers in Indonesia's Informal Sector*, 2011) yang menjelaskan bahwa pembagian kerja berbasis gender telah mengakar kuat di Indonesia, menjadikan pekerjaan perempuan sering kali dianggap sebagai perpanjangan tugas domestik.



Selain di dunia kerja, beban ganda juga menjadi bentuk nyata ketidakadilan gender di Jakarta. (Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 2013) menyebut bahwa perempuan sering kali menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai pekerja produktif di luar rumah dan sebagai pengurus rumah tangga di ranah domestik. Situasi ini menyebabkan perempuan memiliki waktu dan kesempatan yang lebih terbatas untuk mengembangkan diri, termasuk dalam pendidikan dan karier.

Dalam bidang politik, representasi perempuan di lembaga legislatif Jakarta juga masih rendah meskipun kebijakan kuota 30% telah diberlakukan. (Martyn, 2005) menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik Indonesia sering kali bersifat simbolis tanpa akses nyata terhadap sumber daya politik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya efektif meningkatkan keterlibatan perempuan secara substantif.

Kekerasan berbasis gender juga menjadi permasalahan serius. Berdasarkan laporan (Jakarta L. A., 2020), ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap tahun, baik di ranah domestik maupun publik. Data ini memperkuat temuan (Indonesia U. , 2020) yang menyatakan bahwa ketimpangan gender masih menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa ketidakadilan gender di Jakarta bukan hanya fenomena individual, tetapi juga hasil dari sistem sosial yang patriarkal dan tidak setara.

Faktor-Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakadilan gender di Jakarta bersifat multidimensional, mencakup faktor kultural, struktural, dan kebijakan publik. Dari sisi kultural, warisan ideologi patriarki masih mendominasi pola pikir masyarakat. (Suryakusuma, 2011) melalui konsep State Ibuism menjelaskan bahwa sejak masa Orde Baru, perempuan diidentikkan dengan peran sebagai ibu, istri, dan penjaga harmoni keluarga. Ideologi ini masih berpengaruh hingga kini, terutama dalam masyarakat urban yang masih menilai peran utama perempuan berada di ranah domestik.

Secara struktural, kebijakan publik yang belum responsif gender memperkuat ketimpangan tersebut. Misalnya, kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor informal. (Ford, Out of the Shadows: Organising Women Workers in Indonesia's Informal Sector, 2011) menulis bahwa pengorganisasian pekerja perempuan di sektor informal sangat menantang karena masih kuatnya pembagian kerja berdasarkan gender. Sementara itu, di bidang politik, lemahnya dukungan partai terhadap calon legislatif perempuan turut mempersempit peluang keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

Dari sisi ekonomi, ketimpangan juga diperkuat oleh akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan kesempatan. Meskipun perempuan di Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, penelitian (Utomo, 2016) menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi hambatan struktural untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan tinggi belum otomatis menjamin kesetaraan, karena sistem sosial masih memihak laki-laki dalam dunia kerja.

Dampak Ketidakadilan Gender terhadap Pembangunan Sosial

Ketidakadilan gender di Jakarta memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat individu, perempuan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Di tingkat masyarakat, diskriminasi terhadap



perempuan memperkuat siklus ketimpangan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. (Nilan, 2011) mengungkapkan bahwa remaja Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan, masih menginternalisasi peran gender tradisional yang membatasi pilihan pendidikan dan karier mereka.

Selain itu, ketidakadilan gender juga berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi. (Bank, 2016) menegaskan bahwa ketimpangan gender di pasar kerja menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menghambat pembangunan yang inklusif. Ketika perempuan tidak memiliki akses setara terhadap pekerjaan dan sumber daya, potensi produktivitas nasional menjadi terhambat. Dengan demikian, keadilan gender bukan hanya isu sosial, melainkan juga faktor penting dalam keberlanjutan pembangunan kota.

Upaya dan Aplikasi Studi Gender dalam Mengatasi Ketidakadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perspektif studi gender dapat menjadi langkah strategis dalam menganalisis dan mengatasi ketidakadilan di Jakarta. Studi gender berperan penting dalam mengungkap relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif. (Oakley, Sex, Gender and Society, 1972) menyatakan bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah melalui pendidikan dan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, kesadaran kritis terhadap relasi gender perlu ditanamkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, media, hingga kebijakan publik.

Dalam praktiknya, organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK Jakarta telah menggunakan pendekatan berbasis gender untuk mendampingi korban kekerasan dan memperjuangkan perlindungan hukum yang adil. Selain itu, sektor pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Kurikulum yang responsif gender dapat membantu membongkar stereotip lama dan membentuk generasi muda yang memiliki pandangan setara terhadap peran laki-laki dan perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakadilan gender di Jakarta merupakan persoalan kompleks yang berakar pada struktur sosial, budaya, dan kebijakan publik. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi karena perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga akibat sistem sosial yang masih bias terhadap nilai-nilai patriarki. Dalam konteks masyarakat perkotaan, perempuan menghadapi hambatan ganda, baik dalam ruang domestik maupun publik, yang membatasi partisipasi mereka secara setara dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa ketidakadilan gender muncul dalam berbagai wujud seperti dominasi laki-laki dalam pekerjaan formal, rendahnya representasi perempuan dalam politik, dan masih maraknya kekerasan berbasis gender. Kondisi ini menandakan bahwa modernisasi tidak selalu beriringan dengan kesetaraan sosial. Diperlukan pendekatan berbasis studi gender yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pada pembongkaran norma sosial dan kebijakan yang tidak inklusif.

Dengan menempatkan perspektif gender sebagai dasar analisis, penelitian ini memberikan pandangan bahwa kesetaraan bukan sekadar tujuan moral, melainkan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial. Transformasi nilai budaya, pendidikan yang setara, serta kebijakan publik yang responsif gender menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota



yang lebih inklusif dan setara bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. &. (2020). Women's Employment, Gender Norms, and Urban Inequality in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 345–362.
- Aisyah, S. &. (2020). Women's Employment, Gender Norms, and Urban Inequality in Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 345–362.
- Bank, W. (2016). *Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ford, M. &. (2011). *Out of the Shadows: Organising Women Workers in Indonesia's Informal Sector*. Canberra: ANU Press.
- Ford, M. &. (2011). *Out of the Shadows: Organising Women Workers in Indonesia's Informal Sector*. Canberra: ANU Press.
- Ford, M. &. (2011). *Out of the Shadows: Organising Women Workers in Indonesia's Informal Sector*. Canberra: ANU Press.
- Indonesia, U. (2020). *The State of Children in Indonesia – Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children's Rights*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Indonesia, U. W. (2021). *Women and Girls at the Centre of COVID-19 Prevention: Inspirational stories and experiences from the Women and Girls at the Center of COVID-19 Prevention Project in Indonesia*. Jakarta: UN Women Indonesia.
- Jakarta, B. P. (2022). *DKI Jakarta Province in Figures 2022*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Jakarta, L. A. (2020). *Catatan Tahunan (Catahu) LBH APIK Jakarta 2020*. Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. London: Routledge.
- Nilan, P. D. (2011). Indonesian youth looking towards the future: Constraints and opportunities. *Youth Studies Australia*, 18–26.
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.
- Suryakusuma, J. I. (2011). *Sex, Power and Nation: An Anthology of Writings 1979–2003*. Jakarta: Metafor Publishing.
- Utomo, A. (2016). *Women's Labor Force Participation in Indonesia: Trends, Drivers, and Constraints*. Helsinki: United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).